

**4th ANNUAL KARTINI CONFERENCE ON
INDONESIAN FEMINISMS
(KCIF2026)**



**MENGUATKAN
KEPEMIMPINAN DAN KEPEDULIAN FEMINIS
DI TENGAH POLARISASI POLITIK, PERANG
EKONOMI, DAN PARADOKS TEKNOLOGI DIGITAL**

Zoom Meeting, 6-13 September 2026

FRANZ MAGNIS-SUSENO

GEREJA KATOLIK & FEMINISME

Teman-teman, feminisme menegaskan bahwa orang tidak boleh dirugikan karena jenis kelaminnya. Dalam kenyataan feminisme adalah penegasan bahwa perempuan mempunyai hak-hak yang sama dan harus mempunyai kesempatan-kesempatan yang sama dengan laki-laki. Dengan lain kata, feminisme adalah penolakan terhadap patriarkat. Patriarkat yang sejak ribuan tahun menguasai sebagian besar umat manusia. Jadi bahwa dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, juga dalam agama: yang berkuasa dan mengambil keputusan adalah laki-laki. Feminisme menuntut agar diskriminasi itu diakhiri.

Patriarkat dalam pelbagai masyarakat dan agama didukung oleh segala macam pertimbangan. Akan tetapi dalam kenyataan dasar satu-satu klaim laki-laki atas kekuasaan

tertinggi adalah suatu fakta, yaitu bahwa rata-rata kebanyakan perempuan secara fisik kalah terhadap laki-laki. Atau, bahwa rata-rata laki-laki punya daya pukul lebih besar daripada perempuan. Secara sederhana, kalau perbedaan pendapat sampai menjadi perkelahian, yang biasanya menang adalah laki-laki. Dan karena laki-laki punya daya pukul yang lebih besar, laki-lakilah yang menentukan dan menuntut ketaatan. Lu tak taat, lu kupukul. Tak ada keunggulan laki-laki terhadap perempuan kecuali bahwa laki-laki mempunyai daya pukul yang lebih kuat.

Akan tetapi, keunggulan dalam daya pukul tidak memberi hak etis apa pun. Karena itu **feminisme adalah suatu gerakan etis**: Etika yang menuntut agar yang berhak berkuasa bukan yang menang secara fisik, yang lebih mampu memukul *knock-out* lawannya, dan karena itu jelas bahwa tak ada alasan apa pun mengapa kaum perempuan kurang berhak untuk ikut menentukan kehidupan bersama daripada laki-laki. Pendobrakan patriarkat adalah suatu **tuntutan etika**.

Teman-teman, tidak perlu saya bicara tentang feminisme pada umumnya, sudah banyak yang mengangkat feminisme dalam seminar ini. Melainkan, sebagai orang Katolik, saya akan membatasi diri pada implikasi feminisme bagi Gereja Katolik. Karena sebagai orang Katolik saya mulai pada diri kami sendiri. Dan karena Gereja Katolik jelas-jelas mempunyai

masalah dengan feminisme. Kristianitas Katolik dan Ortodoks termasuk benteng-benteng terakhir patriarkat yang belum didobrak feminisme. Gereja Katolik adalah perkumpulan manusia di mana kekuasaan, yaitu kekuasaan rohani, jelas terletak di tangan laki-laki. Perempuan dapat membantu para petugas resmi, akan tetapi para petugas resmi dalam Gereja Katolik (dan dalam Gereja-gereja ortodoks) sampai sekarang adalah laki-laki. Demikian karena hak menentukan dalam Gereja Katolik terletak di tangan orang yang tertahbis, dan yang menurut ajaran Gereja Katolik dapat ditahbiskan hanya laki-laki.

Gereja Katolik mengajarkan bahwa ada tiga kekuasaan yang diterima Gereja dari Tuhan: Kekuasaan mengajar, kekuasaan untuk menahbiskan dan kekuasaan untuk memimpin, dan tiga kuasa itu diterima orang yang sudah dibaptis dalam tahbisan. Ada tiga tingkat orang yang ditahbiskan dalam Gereja Katolik: Diakon, imam dan uskup. Karena menurut Gereja hanya orang laki-laki dapat menerima tahbisan, maka hanyalah laki-laki yang bisa menjadi diakon, imam dan uskup, jadi yang bisa berkhotbah dalam Gereja, memimpin Gereja dan mempunyai kemampuan untuk menahbiskan.

Pembatasan kekuasaan dalam Gereja pada laki-laki itulah yang oleh banyak perempuan, tetapi juga oleh banyak teolog, jadi ahli ajaran Gereja, dan bahkan oleh laki-laki yang ditah-

bisikan dirasakan sebagai diskriminasi yang perlu diakhiri. Saya di sini mau memaparkan bahwa, dilihat dari dalam, jadi dari inti iman Katolik, saya tidak melihat alasan kuat mengapa monopoli laki-laki atas kekuasaan dalam Gereja harus dipertahankan. Saya akan memaparkan mengapa sudah sangat mendesak kaum perempuan mendapat kedudukan dan kekuasaan sama dengan laki-laki dalam Gereja Katolik. Bukan karena feminisme menuntutnya, melainkan karena pembatasan terhadap laki-laki kiranya tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan.

Dapat saya catat di sini bahwa para mainstream Protestantisme sudah mendobrak patriarkat sekitar 60 tahun yang lalu. Sekarang ada pendeta perempuan dan pendeta laki-laki. Pimpinan tertinggi Gereja Anglikan Inggris adalah seorang perempuan. Namun perlu dicatat juga bahwa karena itu sebagian besar gereja-gereja Anglikan di Afrika memisahkan diri dari Gereja Anglikan Induk di Inggris.

Tetapi saya mau mulai dengan kedudukan para biarawati (suster). Dalam Gereja Katolik para biarawati memainkan peran luar biasa. Di Indonesia malah Katolik lebih dikenal karena para biarawati daripada karena para imam. Biarawati adalah perempuan Katolik yang –seperti biarawan laki-laki, iya seperti saya sendiri– mengucapkan tiga kaul: kaul [ketaatan](#), kaul [kemiskinan](#) dan kaul [keperawanan](#). Dengan demikian

kami, para biarawan laki-laki dan para biarawati, mau membebaskan diri dari segala keterikatan duniawi agar kami dapat sepenuhnya melayani Tuhan. Nah, peran para biarawati dalam Gereja Katolik adalah luar biasa: Mereka menyelenggarakan rumah sakit, sekolah dasar dan menengah bagi puteri-puteri dan bahkan, misalnya di Afrika, sekolah-sekolah tinggi. Hampir di mana-mana adalah biarawati yang, seperti Mother Theresa dari Kolkata, membantu orang yang miskin dan tertinggal. Tanpa para biarawati kehidupan Katolik sepertinya akan macet.

Tetapi dalam kenyataan para biarawati adalah rohaniwati kelas dua. Untuk ibadat misa harian saja –misa adalah ibadat terpenting dalam Gereja Katolik- mereka setiap hari harus mengundang, sering: menjemput, seorang Romo karena biarawati tak bisa ditahbiskan menjadi imam dan hanya imam bisa mempersembahkan misa.

Tetapi bukan hanya ini. Para rohaniwan, seperti misalnya saya sendiri, melakukan banyak tugas dan pekerjaan yang tidak memerlukan tahbisan. Misalnya memberi bimbingan rohani, menjadi pastor mahasiswa, mengajar filsafat, teologi, kateketik dan lain-lain, menjadi moderator CLC. Namun hanya sedikit biarawati yang melakukan pekerjaan seperti itu. Mengapa? Karena para biarawati mendapat formasi yang jauh kalah dari formasi para calon pastor. Dalam Gereja Katolik

semua calon pastor wajib studi filsafat dan teologi sekurang-kurangnya selama 12 semester. Mengapa? Bukan karena mereka diharapkan menjadi dosen filsafat atau teologi, seperti misalnya saya. Melainkan karena mereka dalam pelbagai bentuk terlibat dalam bimbingan umat dan untuk itu memerlukan wawasan yang diperlukan untuk bimbingan itu. Studi filsafat dan teologi mau memberi wawasan itu. Sudah sejak 500 tahun para calon imam wajib belajar filsafat dan teologi. Sedangkan para biarawati paling-paling mendapat kuliah kateketik atau ikut beberapa kuliah filsafat atau teologi. Berarti bahwa wawasan intelektual mereka rata-rata memang kalah dengan wawasan para imam. Dari apa yang menjadi tugas para Romo Yesuit, tarekat saya sendiri, di Indonesia 50 persen tidak memerlukan tahbisan. Namun selama para biarawati tidak mendapat pendidikan yang sama luasnya dengan para calon imam kecakapan dan kemampuan mereka tidak akan dapat secukupnya diaktualisasikan. Secara singkat, para calon imam belajar filsafat dan teologi bukan untuk bisa merayakan misa, melainkan untuk bisa memberikan bimbingan kepada umat. Karena itu saya anggap sangat perlu para biarawati secara rutin dan biasa mendapat pendidikan sama dengan para calon imam. Jadi belajar filsafat dan teologi. Kita akan mengalami suatu eksplosif pelayanan umat kalau pada dasarnya para perempuan, baik biarawati maupun pelayan Gereja bukan biarawati, mendapat pendidikan sama dengan para ca-

lon imam. Khususnya dalam hal bimbingan rohani dan retreat saya mengandaikan bahwa ikut serta penuh para biarawati akan memberi sumbangan yang luar biasa.

Tetapi mari kita sekarang kembali kepada masalah inti **defisit feminisme** dalam Gereja Katolik. Masalah **tahbisan**. Memang sejak Paus Fransiskus – ia menjadi pemimpin Gereja Katolik dari tahun 2013 sampai tahun 2025 - Gereja Katolik semakin memberi posisi penting kepada perempuan, baik biarawati maupun awam. Misalnya jabatan penting dalam administrasi keuskupan. Tiga dari 14 dikasteri Vatikan –nama untuk kementerian– sekarang dipimpin oleh perempuan. **Administrasi negara Vatikan**, termasuk negara terkecil di dunia, dipimpin oleh seorang perempuan.

Akan tetapi **tiga kekuasaan**:

- kekuasaan untuk mengajar, jadi mengajarkan apa yang menjadi kepercayaan Katolik yang benar,
- kekuasaan untuk menggembala, jadi untuk memimpin umat, dan
- kekuasaan untuk menahbiskan, jadi untuk berkhotbah dalam gereja, untuk merayakan ekaristi, jadi memimpin misa, dan terutama: **kekuasaan untuk memberi tahbisan** dengan **tiga kekuasaan** itu:

ada pada mereka yang menerima tahbisan, tahbisan diakon, imamat dan tahbisan uskup, dan tahbisan itu secara sah menurut ajaran resmi Katolik **hanya dapat diberikan** kepada laki-laki.

Dalam **hukum Gereja** ditetapkan dengan jelas: "Tahbisan dapat diterima oleh laki-laki yang dibaptis". Dalam pandangan feminisme Katolik ketentuan ini harus berubah menjadi: "**Tahbisan dapat diterima oleh manusia yang dibaptis**".

Yang akhirnya menentukan siapa yang dapat menerima tahbisan dalam Gereja Katolik, adalah pimpinan Gereja, Uskup Roma, **Paus**.

Di Jerman, di Belanda, di beberapa negara Eropa, di Amerika Utara semakin banyak orang Katolik mempertanyakan ketentuan hukum Gereja itu. Bahkan sudah ada uskup yang berpendapat bahwa tahbisan imamat dan uskup bisa, dan karena itu harus, diberikan juga kepada orang **perempuan**. Tetapi di kebanyakan negara Gereja Katolik masih diam saja. Mereka tidak berani, atau mereka merasa bahwa sesuatu yang sudah dianggap hukum Gereja sejak dua ribu tahun tidak bisa dipersoalkan lagi.

Tulisan saya tahun lalu, di mana saya mengangkat tahbisan imamat bagi kaum perempuan tidak mendapat tanggapan apa pun. Masalah itu masih peka. Paus Fransiskus pun tidak

berani. Sementara ini, sejak sekitar 20 tahun, dalam Gereja Katolik Paus sudah diminta untuk mengizinkan agar kaum perempuan dapat menerima tahbisan diakon, tahbisan paling pertama, sebelum tahbisan imamat. Sudah dua kali Paus Benedikt dan kemudian Paus Fransiskus, menugaskan suatu komisi teologis untuk membicarakan kemungkinan tahbisan diakon bagi kaum perempuan, tetapi dua kali komisi tidak mencapai kesatuan paham dan hasil pemikiran dua komisi yang ditugasi memikirkan tahbisan diakon bagi perempuan tidak diumumkan. Paus Benedikt dan Fransiskus sendiri tetap diam. Ada memang yang mengharapakan agar tahbisan diakon kepada kaum perempuan menjadi langkah pertama ke tahbisan imamat bagi kaum perempuan yang menjadi kunci masalahnya.

Tentu tidak tanpa alasan. Pada tahun 1994 (*Ordinatio sacerdotalis*) Paus Johannes Paulus II menanggapi gerakan-gerakan semula feminisme dalam Gereja Katolik, dengan membuat pernyataan resmi bahwa "[Gereja tidak mempunyai kuasa apa pun untuk memberikan tahbisan imamat kepada kaum perempuan.](#)"

Jadi bahwa Gereja oleh Tuhan [tidak diberi kemampuan](#) untuk menahbiskan perempuan. Paus Johannes Paulus II menyebut [tiga alasan](#). [Pertama](#), Yesus sendiri hanya memilih laki-laki menjadi rasulnya. [Kedua](#) mengingat bimbingan Gereja oleh Roh Kudus, maka sesuatu yang merupakan tradisi Gereja

sejak semula, yaitu bahwa yang bisa ditahbiskan imam dan uskup hanya laki-laki, tidak dapat keliru. Yang [ketiga](#): Bahwa orang perempuan tidak dapat menerima tahbisan tidak berarti bahwa martabatnya kurang daripada mereka yang terahbis.

Dalam Gereja Katolik manusia yang dianggap paling tinggi martabatnya adalah [Maria](#), Ibu Yesus, dan Maria tidak menerima tahbisan imamat. Johannes Paulus II menyatakan bahwa itu merupakan ajaran resmi Gereja yang mengikat orang Katolik.

Namun penetapan Paus Johannes Paulus II itu tidak berhasil mendiamkan mereka dalam Gereja Katolik yang berpendapat bahwa Gereja dapat saja mengubah pembatasan tahbisan pada laki-laki dan membukanya bagi perempuan.

Di Jerman, selama tahun 2019-2023 Gereja Katolik, terkejut karena semakin banyak orang meninggalkan Gereja, mengadakan suatu pertemuan luas, dengan para uskup – empat uskup menolak ikut, - rohaniwan, biarawati, awan tentang Gereja Katolik Jerman mau kemana. Pertemuan itu disebut [Jalan Sinodal](#). Di jalan sinodal itu dituntut hal-hal yang di beberapa bagian Gereja Katolik lain dan di Roma dianggap revolusiner: yang paling mencolok: [tahbisan diakon dan imamat bagi kaum perempuan](#) dan kemungkinan [pemberkatan](#) hubungan homoseksual. Yang tentu tidak bisa dilaksanakan oleh Gereja Jer-

man sendirian, melainkan harus diajukan kepada Paus dan harus diizinkan oleh Paus.

Kenyataan saja bahwa di situ uskup-uskup – dengan kekecuaian empat uskup yang tidak setuju, - lalu pimpinan ordo-ordo, organisasi Katolik, dan awam terlibat duduk bersama dan bisa bersama mengadakan refleksi tentang apa yang perlu agar Gereja Katolik Jerman tetap hidup, mengejutkan banyak orang. Ada reaksi-reaksi keras dari kalangan konservatif di dalam Gereja.

Pada tahun 2022 lebih dari 70 uskup, di antaranya beberapa kardinal, kebanyakan dari Amerika Serikat dan Tansania di Afrika, menuduh bahwa Jalan Sinodal lebih terinspirasi oleh analisa-analisa sosiologis dan ideologis seperti oleh jenderisme daripada oleh Roh Kudus dan Injil. Hampir bersamaan Uskup Agung Stanislaw Gadecki, Ketua Konperensi Uskup Polandia, memperingatkan Jalan Sinodal Jerman agar tidak mencari kebenaran di luar Injil. Sebulan kemudian uskup-uskup Eropa Utara (Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia) juga menulis surat yang mengungkapkan keragu-raguan mereka terhadap arah yang diambil oleh Jalan Sinodal Gereja Katolik Jerman.

Paus Fransiskus sendiri tidak pernah mengkritik Jalan Sinodal Jerman. Bahkan, dalam Sinoda para Uskup 2022-2023 di Roma pun uskup-uskup peserta sinode, Paus sendiri, wakil

dan ordo-ordo baik laki-laki maupun perempuan dan awam duduk dan berefleksi bersama. Namun di tahun 2023 ia akhirnya bicara juga. Ia mengatakan bahwa ia mengharapkan kaum perempuan masuk ke dalam segala macam posisi kehidupan Gereja, akan tetapi jabatan yang mengandaikan tahbisan tidak terbuka bagi perempuan. Namun Paus Fransiskus tidak melarang pembicaraan hal itu diteruskan dalam Gereja Jerman (sedangkan Paus Johannes Paulus II di tahun 1994 justru juga menuntut agar pembicaraan tentang kemungkinan imamat bagi kaum perempuan dihentikan). Begitu pula, meski Paus Fransiskus tidak mengizinkan hal tahbisan perempuan dibicarakan dalam Sinode Gereja Katolik yang berlangsung di Roma dalam dua sidang 2022 dan 2023, namun ia menegaskan bahwa hal itu masih terbuka untuk dibicarakan. Dari uskup-uskup Jerman ternyata suatu mayoritas mendukung pembukaan imamat bagi kaum perempuan.

Di sini bukan tempat untuk menguraikan debat itu secara rinci. Saya membatasi diri saja pada satu pertimbangan yang amat kuat untuk membuka tahbisan diakon, imam dan uskup bagi kaum perempuan. Bukankah Yesus sendiri mengatakan dengan sejelas-jelasnya kepada para muridnya: "Apa yang akan kalian ikat di dunia akan diikat di surga dan apa yang kalian lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga!" (Mt.18: 18) Bukankah sesudah dua ribu tahun, dengan perubahan kultural dan sosial mendalam, pada saat di mana jumlah laki-laki yang

bersedia ditahbiskan imam, dengan kewajiban dalam Gereja Katolik untuk tidak nikah dan tidak aktif secara seksual, semakin berkurang, sudah waktu Gereja Katolik melepaskan pengikatan tahbisan diakon, imam dan uskup pada lelaki-lakian?

Masalah dapat dirumuskan melalui dua pertanyaan. Pertama, mengapa sesudah 2000 tahun pembatasan imamat pada laki-laki mau diakhiri? Kedua, bagaimana harapan itu dapat disesuaikan dengan penegasan keras Paus Johannes Paulus II tadi yang secara resmi, sebagai Paus dan Guru tertinggi Gereja Katolik, menyatakan bahwa Gereja tidak diberi kuasa untuk mengubah keterikatan imamat pada kaum laki-laki?

Tuntutan agar tahbisan dibuka bagi kaum perempuan sering dituduh merupakan penyesuaian dengan semangat zaman dan dengan ilmu-ilmu sosial-psikologis, pada hal pembatasan tahbisan pada laki-laki merupakan ajaran Gereja sejak semula, berakar dalam kenyataan bahwa yang dipanggil Yesus menjadi rasul, ke-12 rasul, adalah laki-laki dan itu ajaran semua Gereja sejak semula. Namun, seperti dijawab oleh Jalan Sinodal Gereja Jerman terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis sekian uskup dari luar, desakan agar Gereja Katolik mencabut penolakan terhadap tahbisan imamat bagi kaum perempuan tidak merupakan penyesuaian dengan semangat zaman atau segala macam pertimbangan gender – meski

banyak dari pertimbangan jender tepat - melainkan berdasarkan pertimbangan teologis yang kuat. Yaitu bahwa meineruskan pembatasan imamat pada lelaki-lakian dan penolakan terhadap peluasan tahbisan imamat kepada kaum perempuan justru bisa saja tidak saja sesuai dengan kehendak Roh Allah. Kalau Gereja tetap tidak mau membuka tahbisan bagi kaum perempuan justru bisa berarti menutup diri terhadap desakan Roh Allah. Perlu diperhatikan bahwa Yesus tak pernah mengatakan bahwa hanya laki-laki dapat menjadi rasul. Argumen inti yang dikemukakan Paulus Johannes Paulus II untuk meinetapkan bahwa Gereja tidak punya kuasa untuk memperluas imamat pada kaum perempuan adalah bahwa yang hadir pada perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalib – di mana para hadirin menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus, yang dalam Gereja dianggap dasar sakramen imamat - hanya keduabelas rasul, jadi laki-laki, dan karena itu tahbisan imamat hanya untuk laki-laki. Akan tetapi tahbisan kemudian diteruskan oleh para rasul dan tak ada alasan mengapa hanya kepada yang laki-laki. Tambahan pula, belum tentu bahwa perjamuan terakhir hanya diikuti oleh ke-12 rasul itu. Dalam injil Lukas (8: 2) kita membaca bahwa Yesus dan para 12 rasul alam perjalanan mereka disertai juga oleh beberapa perempuan, termasuk Maria Magdalena dan Maria, Ibu Yesus sendiri, namun mereka umumnya tidak disebut. Maka sangat mungkin bahwa di perjamuan terakhir perempaun-

perempuan, ya Maria Magdalena, ya Maria ibu Yesus, itu juga hadir. Dengan demikian argumen Paus Johannes Paulus II kehilangan dasarnya. Tradisi 2000 tahun dalam gereja-gereja Katolik dan Ortodoks bahwa tahbisan hanya untuk kaum laki-laki dengan demikian merupakan tradisi saja dan suatu tradisi, kalau ada alasan yang kuat, dapat diubah. Sekalil lagi, ingat kata Yesus kepada para rasul: "apa yang kalian lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga". Kiranya sudah waktunya Gereja melepaskan ikatan tahbisan imamat dan uskup pada kelaiki-lakian. Semakin banyak orang Katolik - tidak hanya di Jerman - berpendapat bahwa Gereja - yang sudah tergoncangkan oleh skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa imam laki-laki - akan kehilangan harkat Rohani apabila tetap mempertahankan penolakan tahbisan imamat bagi kaum perempuan. Harapan bahwa orang perempuan pun dapat menerima tahbisan dengan demikian bukan sekedar penyesuaian dengan semangat jaman, melainkan bisa saja dorongan Roh Allah sendiri.

Dengan demikian penegasan Paus Johannes Paulus II bahwa Gereja tidak diberi kuasa untuk menahbiskan perempuan kehilangan dasarnya. Kiranya Yesus memberi kekuasaan kepada murid-muridnya untuk menetapkan hal-hal penting dalam Gereja dan karena itu Gereja memiliki kuasa untuk melepaskan keterikatan tahbisan imamat dan uskup pada laki-laki. Tak

ada alasan teologis kuat apa pun mengapa perempuan tidak dapat menjadi imam.

Teman-teman, dengan demikian ada harapan bahwa dalam Gereja Katolik pun diskriminasi terhadap kaum perempuan akan berakhir. Kami sudah *on the way*. Pengalaman Gereja-gereja Protestan dengan membuka kepemimpinan bagi kaum perempuan adalah seluruhnya positif. Dalam situasi di mana di banyak daerah agama pada umumnya semakin dipersoalkan, pendobrakan patriarkat dalam Gereja Katolik akan sangat penting. Sekarang pun kaum perempuan, justru biarawati-biarawati, memainkan peranan jauh lebih besar dalam Gereja Katolik daripada dulu. Akan tetapi dobrakan yang sebenarnya baru akan terjadi apabila di Gereja Katolik pun perempuan dapat ditahbiskan menjadi diakon, imam dan uskup – dan barangkali Paus?

Terima kasih.■

